



RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DEARAH (RLPPD)

TAHUN 2025



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DOMPU

TAHUN 2026

KATA PENGANTAR

Puji dan rasa syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Kabupaten Dompu Tahun 2025 telah tersusun dengan baik, lancar, dan tepat waktu.

LPPD adalah laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan selama 1 (satu) tahun anggaran.

LPPD disusun dalam rangka menjalankan amanat ketentuan Pasal 69 ayat (1) dan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Kepala Daerah wajib menyampaikan LPPD kepada Pemerintah yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Penyusunan LPPD dilaksanakan berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran tahunan Rencana Strategi Perangkat Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). LPPD juga dipergunakan sebagai sumber informasi utama untuk melakukan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD) sebagaimana diamanatkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Kami menyadari bahwa penyusunan LPPD ini meskipun telah berpedoman pada kaidah-kaidah sesuai ketentuan yang berlaku, namun masih terdapat ketidaksempurnaan baik secara materiil maupun dalam redaksional. Oleh karena itu kami mengharapkan sumbangsih pemikiran, usul masukan dan saran pertimbangan dari berbagai pihak yang berkepentingan, semata-mata untuk perbaikan dan peningkatan kinerja Pemerintah Kabupaten Dompu di masa yang akan datang.

Akhirnya kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak atas dukungan dan partisipasinya sehingga kami dapat mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik dan bersih.

Dompu, Maret 2026
BUPATI DOMPU

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Bambang Firdaus', written over a horizontal line.

BAMBANG FIRDAUS, S.E



1. Capaian kinerja Makro

Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan Pemerintah daerah secara Umum. Capaian kinerja makro dihasilkan oleh berbagai macam program yang diselenggarakan oleh pemerintah Daerah dan Pemerintahan Pusat pihak swasta dan pihak terkait dalam pembangunan nasional.

Tabel 2.1 Indikator strategi kinerja Pemerintah Daerah kabupaten Dompu tahun 2025

No	Indikator	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
1	Indikator Pembangunan Manusia (IPM)	68,45	70,96	71,77	72,59	73,58
2	Persentase Penduduk Miskin	12,60	12,40	12,62	11,59	11,15
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	3,02	2,5	2,36	2,7	2,84
4	Pertumbuhan ekonomi	1,68	2,95	3,17	3,62	4,75
5	Pengeluaran Perkapita (ribu)	8899	9203	9404	9971	10230
6	Ketimpangan Pendapatan GiniRasio	0,36	0,31	0,33	0,292	0,341

Indek Pembangunan Manusia adalah Nilai indeks pembangunan manusia daerah kabupaten Dompu tahun 2025 sebesar 73,58 mengalami kenaikan sebesar 0,99%

Angka kemiskinan adalah persentase penduduk miskin daerah yang bersangkutan angka kemiskinan kabupaten Dompu tahun 2025 sebesar 11,15% dibandingkan tahun 2024 angka kemiskinan 11,59% atau ada penurunan angka kemiskinan 0,44%

Angka Pengangguran terbuka (TPT) tahun 2025 sebesar 2,84% dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar 2,7% artinya ada peningkatan 0,14%.



Pertumbuhan Ekonomi pada tahun 2025 sebesar 4,75% mengalami peningkatan sebesar 1,13% dibandingkan pada tahun 2024 sebesar 3,62%.

Pengeluaran Perkapita pada tahun 2025 sebesar Rp. 10.230.000 meningkat sebesar 259.000 dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar Rp. 9.971.000.

Gini Rasio pada tahun 2025 sebesar 0,341 persen dan mengalami peningkatan sebesar 0,049 persen di bandingkan pada tahun 2024.

2. Capaian SPM

1. SPM Pendidikan

Pemerintah daerah wajib melakukan pemenuhan terhadap SPM pendidikan yang mencakup SPM pendidikan Daerah provinsi dan SPM pendidikan Daerah kabupaten/kota. Jenis Pelayanan Dasar pada SPM pendidikan kabupaten/kota meliputi:

1. Pendidikan anak usia dini
2. Pendidikan dasar
3. Pendidikan kesetaraan

Penerima Pelayanan Dasar untuk setiap satuan pendidikan bagi pemerintah kabupaten/kota adalah sebagai berikut:

- a. usia 16 (enam belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar pendidikan menengah;
- b. usia 4 (empat) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar pendidikan khusus;
- c. usia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar pendidikan anak usia dini;
- d. usia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar pendidikan dasar
- e. usia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar pendidikan kesetaraan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai standar teknis dalam upaya



pemenuhan SPM Pendidikan adalah dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan. Adapun capaian SPM Urusan Pendidikan Tahun 2025 yaitu :

Table 1.1
CAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
URUSAN PENDIDIKAN KABUPATEN DOMPU TAHUN 2025

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian	AKSI
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM					100.00%	
1 .	Pendidikan Dasar Usia Dini					100.00%	
			Target 100% (SPM)	APS Tahun N-1	Selisih Yang Harus Dilayani di Tahun N		
	ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH (5-6 tahun) *Tidak Masuk Kedalam Perhitungan	Persentase	0	0	0	0.00%	
PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)						-80%	80.00%
			Jumlah Total	Jumlah Total	Yang Belum		
			Yang Harus Dilayani	Yang Terlayani	Terlayani		
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	7.703	7.703	0	100.00%	
PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)						-20%	20.00%
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi		
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					100.00%	
	1 .Peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B	Persentase	22.14	22.14	0	100.00%	
	2 .Proporsi guru PAUD dengan kualifikasi Sarjana (S1)/Diploma empat (D-IV)	Persentase	64.1	64.1	0	100.00%	
2 .	Pendidikan Dasar					100.00%	
			Target 100% (SPM)	APS Tahun N-1	Selisih Yang Harus Dilayani di Tahun N		



RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (RLPPD)

TAHUN 2025 KABUPATEN DOMPU



ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH (7-12 tahun) SD *Tidak Masuk Kedalam Perhitungan	Persentase	0	0	0	0.00%
--	------------	---	---	---	-------

ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH (13-15 tahun) SMP *Tidak Masuk Kedalam Perhitungan	Persentase	0	0	0	0.00%
--	------------	---	---	---	-------

PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				-80%	80.00%
--	--	--	--	------	--------

		Jumlah Total		Yang Belum	
		Yang Harus Dilayani	Yang Terlayani	Terlayani	
A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	44.098	44.098	0	100.00%

PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				-20%	20.00%
--	--	--	--	------	--------

		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	
--	--	--	--	---------------------------------------	--

B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					100.00%
---	--	--	--	--	---------

SD (2025)					100.00%
-----------	--	--	--	--	---------

1 . Kemampuan literasi	Nilai	53.71	53.71	0	100.00%
------------------------	-------	-------	-------	---	---------

2 . Kemampuan numerasi	Nilai	50.07	50.07	0	100.00%
------------------------	-------	-------	-------	---	---------

3 . Indeks iklim keamanan	Nilai	75.4	75.4	0	100.00%
---------------------------	-------	------	------	---	---------

4 . Indeks iklim kebhinekaan	Nilai	69.34	69.34	0	100.00%
------------------------------	-------	-------	-------	---	---------

5 . Indeks iklim inklusivitas	Nilai	59.64	59.64	0	100.00%
-------------------------------	-------	-------	-------	---	---------

SMP (2025)					100.00%
------------	--	--	--	--	---------

1 . Kemampuan literasi	Nilai	57.7	57.7	0	100.00%
------------------------	-------	------	------	---	---------

2 . Kemampuan numerasi	Nilai	55.57	55.57	0	100.00%
------------------------	-------	-------	-------	---	---------

3 . Indeks iklim keamanan	Nilai	67.06	67.06	0	100.00%
---------------------------	-------	-------	-------	---	---------

4 . Indeks iklim kebhinekaan	Nilai	69.32	69.32	0	100.00%
------------------------------	-------	-------	-------	---	---------

5 . Indeks iklim inklusivitas	Nilai	55.93	55.93	0	100.00%
-------------------------------	-------	-------	-------	---	---------

3 . Pendidikan Kesetaraan					100.00%
---------------------------	--	--	--	--	---------

		Target 100% (SPM)	APS Tahun N-1	Selisih Yang Harus Dilayani di Tahun N	
--	--	-------------------	---------------	--	--

ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH (7-18 tahun) KESETARAAN *Tidak Masuk Kedalam Perhitungan	Persentase	0	0	0	0.00%
--	------------	---	---	---	-------



**RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (RLPPD)
TAHUN 2025 KABUPATEN DOMPU**



PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				-80%	80.00%
		Jumlah Total	Jumlah Total	Yang Belum	
		Yang Harus Dilayani	Yang Terlayani	Terlayani	
A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	1.546	1.546	0	100.00%
PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				-20%	20.00%
		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	
B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					100.00%
1 .Angka partisipasi sekolah (7-18 tahun) kesetaraan	Persentase	44.52	44.52	0	100.00%

2. SPM Kesehatan

Cakupan SPM kesehatan terdiri dari SPM kesehatan Daerah provinsi dan SPM kesehatan Daerah kabupaten/kota. Mutu Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan SPM meliputi standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa, standar jumlah dan kualitas personel/sumber daya manusia kesehatan dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar. Jenis Pelayanan Dasar pada SPM kesehatan Daerah provinsi terdiri atas pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi, dan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi.

Jenis SPM yang menjadi tanggungjawab pemerintah kabupaten/kota adalah sebagai berikut:

1. Pelayanan kesehatan ibu hamil
2. Pelayanan kesehatan ibu bersalin
3. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir
4. Pelayanan kesehatan balita
5. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar
6. Pelayanan kesehatan pada usia produktif



7. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut
8. pelayanan kesehatan penderita hipertensi
9. Pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus
10. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat
11. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberculosis
12. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*) yang bersifat peningkatan/ promotif dan pencegahan/preventif.

Ketentuan lebih lanjut mengenai standar teknis dalam upaya pemenuhan SPM Kesehatan adalah dengan mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan. Adapun capaian SPM Urusan Kesehatan Tahun 2025 yaitu :

Table 2.1
Realisasi SPM Bidang Kesehatan Tahun 2025

NO	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR STANDAR PELAYANAN MINIMAL	RUMUS		CAPAIAN TAHUN 2025		
			PEMBILANG	PENYEBUT	PEMBILANG	PENYEBUT	%
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan ibu hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan K4 di fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah dan swasta	Jumlah semua ibu hamil di wilayah Kabupaten Dompu tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama	5541	4410	79,82%
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasilitas kesehatan	Jumlah semua ibu bersalin yang ada di wilayah Kabupaten Dompu tersebut dalam kurun waktu satu tahun	5479	4466	81,51%

**RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (RLPPD)****TAHUN 2025 KABUPATEN DOMPU**

3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Presentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai dengan standar	Jumlah semua bayi baru lahir di wilayah Kabupaten Dompus tersebut dalam kurun waktu satu tahun	5238	4377	83,56%
4	Pelayanan Kesehatan Balita	Persentase anak usia 0-59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Jumlah balita 0-59 bulan yang mendapat pelayanan kesehatan balita sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	Jumlah balita 0-59 bulan yang ada di wilayah kerja Kabupaten Dompus dalam kurun waktu satu tahun yang sama	25595	18208	71,14%
5	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Jumlah anak usia pendidikan dasar kelas 1 s.d kelas 9 yang mendapat pelayanan skrining kesehatan di satuan pendidikan dasar	Jumlah semua anak usia pendidikan dasar kelas 1 s.d kelas 9 yang ada di wilayah kerja di wilayah Kabupaten Dompus tersebut dalam kurun waktu satu tahun ajaran	39810	39810	100%
6	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Persentase warga negara usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Jumlah pengunjung usia 15-59 tahun mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	Jumlah warga negara usia 15-59 tahun yang ada di wilayah kerja Kabupaten Dompus dalam kurun waktu satu tahun yang sama	160038	124960	78,08%
7	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Persentase warga negara usia 60 tahun Keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Jumlah pengunjung berusia 60 tahun ke atas yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali dalam kurun waktu satu tahun	Jumlah semua penduduk berusia 60 tahun ke atas yang ada di wilayah Kabupaten Dompus tersebut dalam kurun waktu satu tahun perhitungan	25425	25589	100,65%



8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Persentase penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah penderita hipertensi yang datang mendapatkan pelayanan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	Estimasi jumlah penderita hipertensi yang ada di wilayah Kerja Kabupaten Dompus dalam kurun waktu satu tahun yang sama	12783	11600	90,75%
9	Pelayanan Kesehatan Penderita	Persentase penyandang DM yang	Jumlah penyandang DM yang	Jumlah penyandang DM berdasarkan	2594	2519	97,11%
	Diabetes Melitus (DM)	mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar	mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	angka prevalensi DM nasional di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun pada tahun yang sama			
10	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Jumlah ODGJ berat (psikotik) di wilayah kerja kab/kota yang mendapat pelayanan kesehatan jiwa promotif preventif sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	Jumlah ODGJ berat (psikotik) yang ada di wilayah kerja kab/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama	662	890	134,44%



**RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (RLPPD)
TAHUN 2025 KABUPATEN DOMPU**



11	Pelayanan Kesehatan Orang terduga Tuberkulosis (TB)	Persentase Orang terduga TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar	Jumlah orang terduga TB yang mendapatkan pelayanan TB sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	Jumlah orang terduga TB yang ada di wilayah kerja pada kurun waktu satu tahun yang sama	3117	4711	151,14%
12	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Persentase orang berisiko terinfeksi HIV mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar	Jumlah orang berisiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar di fasyankes dalam kurun waktu satu tahun	Jumlah orang berisiko terinfeksi HIV yang ada di satu wilayah kerja pada kurun waktu satu tahun yang sama	7815	8282	105,98%

3. SPM Pekerjaan Umum

Mutu Pelayanan Dasar untuk setiap jenis pelayanan pekerjaan umum memuat standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar. SPM pekerjaan umum mencakup SPM pekerjaan umum Daerah provinsi dan SPM pekerjaan umum Daerah kabupaten/kota. Jenis Pelayanan Dasar pada SPM pekerjaan umum Daerah provinsi terdiri atas pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota, dan penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota.

Sesuai dengan undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Dompu Tahun 2021-2026 merupakan Dokumen Perencanaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Dompu memuat Visi, Misi, tujuan, strategis, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Dompu yang disusun sesuai dengan berpedoman pada rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029.

Sementara itu, jenis Pelayanan Dasar pada SPM pekerjaan umum Daerah kabupaten/kota meliputi pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari, dan penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik. Secara teknis, proses pemenuhan SPM Pekerjaan Umum dijabarkan ke dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor29/PRT/M/2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal. Adapun capaian SPM Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2025 yaitu :

Table 3.1

Target dan Realisasi untuk “Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota”

Indikator Kinerja Sesuai Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Rensta Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-				
	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/ kota	96,00 %	96,50 %	97,00 %	98,00%	98,50 %	55,32%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Table 3.2

Target dan Realisasi untuk
“Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestic”
Tahun 2025

Indikator Kinerja Sesuai Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Rensta Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-				
	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11



Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
---	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-------	-------	-------	-------

4. SPM Perumahan Rakyat

SPM perumahan rakyat mencakup SPM perumahan rakyat Daerah provinsi dan SPM perumahan rakyat Daerah kabupaten/kota. Penerima Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis SPM perumahan rakyat yaitu Warga Negara dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Korban bencana provinsi yang memiliki rumah terkena dampak bencana untuk Jenis Pelayanan Dasar penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi
2. Masyarakat yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah provinsi untuk Jenis Pelayanan Dasar fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi
3. Korban bencana kabupaten/kota yang memiliki rumah terkena dampak bencana untuk Jenis Pelayanan Dasar penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota
4. Masyarakat yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota untuk Jenis Pelayanan Dasar fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

Jenis pelayanan dasar pada SPM perumahan rakyat Daerah provinsi terdiri atas penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi, dan fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi. Sementara itu jenis pelayanan dasar pada SPM perumahan rakyat Daerah kabupaten/kota terdiri atas penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota, dan



fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

Secara teknis, pengaturan SPM perumahan rakyat dalam implementasinya berpedoman pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal. Adapun capaian SPM Urusan Perumahan Rakyat Tahun 2025 yaitu :

Tabel 4.2
Target Pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat Tahun 2025

No.	Jenis Layanan Dasar	Sub kegiatan	Target	Satuan	(%)
1	Penyediaan & reabilitasi Rumah yg layak huni Bagi korban bencana Kab/kota	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	4	Unit	100%
		Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	1	Dokumen	100%
2	Fasilitasi Penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten kota	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	1	Dokumen	100%

5. SPM Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat

Penerima layanan dasar SPM ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat mencakup SPM ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat, yaitu Warga Negara dengan ketentuan:

1. yang terkena dampak gangguan ketenteraman dan ketertiban umum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Peraturan Daerah provinsi dan peraturan kepala Daerah provinsi untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum provinsi.



2. yang terkena dampak gangguan ketenteraman dan ketertiban umum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Peraturan Daerah kabupaten/kota dan peraturan kepala Daerah kabupaten/kota untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum, dan warga negara tersebut bukan pelanggar Perda/Perkada.
3. yang berada di kawasan rawan bencana dan yang menjadi korban bencana untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan informasi rawan bencana, pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, dan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana yang menjadi korban kebakaran atau terdampak kebakaran untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran Ketentuan lebih lanjut mengenai standar teknis dalam upaya pemenuhan SPM ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat adalah dengan mengacu pada Peraturan Menteri sebagai berikut :
 - a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Di Provinsi Dan Kabupaten/Kota.
 - b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub- Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota.
 - c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota.



Tabel 5.1
Capaian standar pelayanan minimal urusan kebencanaan kabupaten dompu tahun 2025

KATEGORI PENCAPAIAN SPM KEBENCANAAN						68.89 %
1	Pelayanan Informasi Rawan Bencana					100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)					(80%) 80.00 %
			Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	11125	11125	0	100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN LAYANAN (100%)					(20%) 20.00 %
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	

B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					100.00 %	
1 . Penyusunan Kajian Risiko Bencana		0	0		100.00 %	



RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (RLPPD)
TAHUN 2025 KABUPATEN DOMPU



a. Tersedianya Dokumen KRB yang telah dilegalkan minimal perkada dengan lampiran dalam bentuk kajian dan album peta	dokumen	1	1	0	100.00 %	
b. Tersedianya Dokumen KRB yang siap untuk di legalkan sebagai lampiran perkada dalam bentuk kajian dan album peta	dokumen	1	1	0	100.00 %	
2 . Komunikasi, Informasi dan Edukasi Rawan Bencana		0	0		100.00 %	
1) . Sosialisasi Melalui Tatap Muka dengan Penduduk di Daerah Rawan Bencana*<i>Tidak Boleh Ditutup Semua, Harus Dipilih Salah Satu</i>					100.00 %	
a. Tersedianya bahan paparan dan/atau Alat Sosialisasi untuk pertemuan tatap muka (leaflet, booklet, pamflet dll sesuai jumlah peserta)	eksemplar	3	3	0	100.00 %	
b. Terlaksananya sosialisasi tatap muka	desa	2	2	0	100.00 %	
B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					100.00 %	
1 . Penyusunan Kajian Risiko Bencana		0	0		100.00 %	
a. Tersedianya Dokumen KRB yang telah dilegalkan minimal perkada dengan lampiran dalam bentuk kajian dan album peta	dokumen	1	1	0	100.00 %	
b. Tersedianya Dokumen KRB yang siap untuk di legalkan sebagai lampiran perkada dalam bentuk kajian dan album peta	dokumen	1	1	0	100.00 %	
2 . Komunikasi, Informasi dan Edukasi Rawan Bencana		0	0		100.00 %	
1) . Sosialisasi Melalui Tatap Muka dengan Penduduk di Daerah Rawan Bencana*<i>Tidak Boleh Ditutup Semua, Harus Dipilih Salah Satu</i>					100.00 %	
a. Tersedianya bahan paparan dan/atau Alat Sosialisasi untuk pertemuan tatap muka (leaflet, booklet, pamflet dll sesuai jumlah	eksemplar	3	3	0	100.00 %	



**RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (RLPPD)
TAHUN 2025 KABUPATEN DOMPU**



peserta)							
b. Terlaksananya sosialisasi tatap muka		desa	2	2	0	100.00 %	
	a. Tersedianya Rambu Evakuasi (sesuai dengan kebutuhan)	buah	0	0	0	100.00 %	
	b. Tersedianya Papan informasi publik (sesuai dengan kebutuhan)	buah	0	0	0	100.00 %	
	c. Tersedianya Tim Teknis (sesuai dengan kebutuhan)	orang	2	0	2	100.00 %	
	d. Tersedianya Tenaga Surveyor (sesuai dengan kebutuhan)	orang	3	0	3	100.00 %	
	e. Tersedianya Tenaga pendukung lainnya (sesuai dengan kebutuhan)	orang	2	0	2	100.00 %	
2	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana					11.67 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				(80%)	0.00 %	
			Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani		

A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	20	0	0.00 %	
---------------------------------	-------	----	---	--------	--



**RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (RLPPD)
TAHUN 2025 KABUPATEN DOMPU**



PERSENTASE PENCAPAIAN LAYANAN (100%)				11.67 %		
		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi		
B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					58.33 %	
1 . Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana		0	0		0.00 %	
2 . Pembuatan Rencana Kontijensi (RENKON)		0	0		0.00 %	
3 . Pelatihan, Pencegahan dan Mitigasi		0	0		50.00 %	
1) . Pelatihan Penanggulangan Bencana bagi Aparatur*<i>Tidak Boleh Ditutup Semua, Harus Dipilih Salah Satu</i>					0.00 %	
a. Tersedianya Perlengkapan sarpras pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	paket	30	0	30	0.00 %	
b. Tersedianya Materi pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	paket	3	0	3	0.00 %	
c. Tersedianya Sertifikat pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	buah	30	0	30	0.00 %	



d. Tersedianya Asesmen sertifikasi profesi bidang penanggulangan bencana (sesuai dengan kebutuhan)	paket	0	0	0	0.00 %	
e. Tersedianya Instruktur dan Narasumber (sesuai dengan kebutuhan)	orang	4	0	4	0.00 %	
f. Tersedianya Penyelenggara Pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	orang	5	0	5	0.00 %	
2) . Pelatihan Penanggulangan Bencana bagi Warga Negara*<i>Tidak Boleh Ditutup Semua, Harus Dipilih Salah Satu</i>					100.00 %	
a. Tersedianya Perlengkapan sarpras pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	paket	30	0	30	100.00 %	
b. Tersedianya Materi pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	paket	3	0	3	100.00 %	
c. Tersedianya Sertifikat pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	buah	30	0	30	100.00 %	
d. Tersedianya Instruktur dan Narasumber (sesuai dengan kebutuhan)	orang	4	0	4	100.00 %	
e. Tersedianya Penyelenggara Pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	orang	5	0	5	100.00 %	
4 . Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana		0	0		100.00 %	
1) . Simulasi Dalam Ruang (Table-Top Exercise)*<i>Tidak Boleh Ditutup Semua, Harus Dipilih Salah Satu</i>					100.00 %	
a. Tersedianya Dokumen Latihan table top exercise (sesuai dengan kebutuhan)	dokumen	1	0	1	100.00 %	
b. Tersedianya Sarpras dan peralatan pendukung simulasi dalam ruangan/table top exercise (sesuai dengan kebutuhan)	paket	1	0	1	100.00 %	
c. Tersedianya Penyelenggara simulasi dalam ruang/table top exercise (sesuai dengan kebutuhan)	orang	1	0	1	100.00 %	



2) . Gladi Lapang*Tidak Boleh Ditutup Semua, Harus Dipilih Salah Satu					100.00 %	
a. Tersedianya Dokumen latihan Gladi lapang (sesuai dengan kebutuhan)	dokumen	1	0	1	100.00 %	
b. Tersedianya Sarpras dan peralatan pendukung Gladi Lapangan (sesuai dengan kebutuhan)	paket	1	0	1	100.00 %	
c. Tersedianya Penyelenggara gladi lapang (sesuai dengan kebutuhan)	orang	1	0	1	100.00 %	
5 . Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana		0	0		100.00 %	
1) . Koordinasi Teknis Pemantapan Kesiapsiagaan terhadap Bencana*Tidak Boleh Ditutup Semua, Harus Dipilih Salah Satu					100.00 %	
a. Tersedianya Layanan Pusdalops BPBD 24/7 (minimal jumlah hari dalam setahun)	hari	0	0	0	100.00 %	
b. Tersedianya Rapat koordinasi teknis pemantapan kesiapsiagaan bencana (sesuai dengan kebutuhan)	pertemuan	0	0	0	100.00 %	
c. Tersedianya Manajer Pusdalops (minimal 1)	orang	1	0	1	100.00 %	
d. Tersedianya Koordinator Tim Teknis Pusdalops (sesuai dengan kebutuhan)	orang	1	0	1	100.00 %	
e. Tersedianya Tim Teknis Pusdalops (sesuai dengan kebutuhan)	orang	1	0	1	100.00 %	
2) . Penyediaan Sarana Prasarana Operasional dan Kesiapsiagaan Bencana*Tidak Boleh Ditutup Semua, Harus Dipilih Salah Satu					100.00 %	
a. Tersedianya Sarpras TIK Pusdalops (sesuai dengan kebutuhan)	unit	0	0	0	100.00 %	
b. Tersedianya Sarpras komando dan monitoring utama (sesuai dengan kebutuhan)	unit	1	0	1	100.00 %	



c. Tersedianya Sarpras rapat pimpinan (sesuai dengan kebutuhan)	unit	1	0	1	100.00 %	
d. Tersedianya Sarpras istirahat petugas jaga Pusdalops (sesuai dengan kebutuhan)	unit	0	0	0	100.00 %	
3) . Penyediaan Layanan Pesan Singkat secara Broadcast*<i>Tidak Boleh Ditutup Semua, Harus Dipilih Salah Satu</i>					100.00 %	
a. Tersedianya Peralatan teknologi informasi dan komunikasi untuk layanan pesan singkat secara broadcast (sesuai dengan kebutuhan)	paket	1	0	1	100.00 %	
b. Tersedianya Operasional teknologi informasi komunikasi (sesuai dengan kebutuhan)	paket	1	0	1	100.00 %	
4) . Penyediaan Sarana Prasarana berupa Alat Komunikasi dan Sistem Peringatan Dini Kebencanaan berbasis Masyarakat*<i>Tidak Boleh Ditutup Semua, Harus Dipilih Salah Satu</i>					100.00 %	
a. Tersedianya Peralatan penyebaran perintah evakuasi kepada masyarakat (sesuai dengan kebutuhan)	paket	1	0	1	100.00 %	
b. Tersedianya Alat komunikasi darurat bencana komunitas (sesuai dengan kebutuhan)	paket	1	0	1	100.00 %	
6 . Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana					100.00 %	
a. Tersedianya Peralatan keselamatan petugas (sesuai dengan kebutuhan)	paket	85	85	0	100.00 %	
b. Tersedianya Peralatan keselamatan keluarga (sesuai dengan kebutuhan)	paket	30	30	0	100.00 %	
c. Tersedianya Peralatan keselamatan individu/pribadi (sesuai dengan kebutuhan)	paket	4	4	0	100.00 %	
e. Tersedianya Peralatan penyelamatan korban bencana (sesuai dengan kebutuhan)	unit	62	62	0	100.00 %	



**RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (RLPPD)
TAHUN 2025 KABUPATEN DOMPU**



3	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana					95.00 %	
Terjadi Bencana (Lampirkan SK Bencana)							
Download SK Yang Telah Di Upload 5205-20250714085116SK TG.DARURAT 16 MEI 2025.pdf							
PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)					(80%)	80.00 %	
			Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani		
A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	5	5	0	100.00 %		
PERSENTASE PENCAPAIAN LAYANAN (100%)					(20%)	15.00 %	
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi		
B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					75.00 %		
1 . Respon Cepat Darurat Bencana							
		0	0		100.00 %		
a. Tersusunnya Laporan kaji cepat (sesuai dengan kebutuhan kejadian bencana)	dokumen	1	1	0	100.00 %		



**RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (RLPPD)
TAHUN 2025 KABUPATEN DOMPU**



	b. Tersedianya Tim Kaji Cepat atau TRC yang diaktifkan (sesuai dengan kebutuhan kejadian bencana)	orang	8	8	0	100.00 %	
	2. Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana		0	0		50.00 %	
	a. Tersedianya Peralatan komunikasi darurat lapangan (sesuai dengan kebutuhan)	paket	30	0	30	0.00 %	
	b. Tersedianya Sarana dan prasarana pertolongan dan evakuasi (sesuai dengan kebutuhan)	unit	6	6	0	100.00 %	
	c. Tersedianya Sarana dan prasarana pembuatan jalur pertolongan dan evakuasi (sesuai dengan kebutuhan)	unit	0	0	0	0.00 %	
	d. Tersedianya Data operasi pencarian, penyelamatan, dan evakuasi korban bencana (sesuai dengan kebutuhan)	dokumen	5	5	0	100.00 %	
	e. Tersusunnya Laporan operasi pertolongan, penyelamatan, evakuasi korban (sesuai dengan kebutuhan)	dokumen	5	5	0	100.00 %	
	f. Tersedianya Petugas pos lapangan (sesuai dengan kebutuhan)	orang	0	0	0	0.00 %	
	g. Tersedianya Operator sarana dan prasarana pertolongan dan evakuasi dan pembuatan jalur pertolongan dan evakuasi (sesuai dengan kebutuhan)	orang	0	0	0	0.00 %	
	h. Tersedianya Petugas pencarian, penyelamatan, dan evakuasi korban bencana (sesuai dengan kebutuhan)	orang	30	30	0	100.00 %	



CAPAIAN SPM URUSAN TRANTIBLIMAS (POL-PP)
KABUPATEN DOMPU TAHUN 2025

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
1	2	3			4
A.	KABUPATEN/KOTA KAB. DOMPU				100%
1.	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Kabuapten/Kota	Capaian Penegakan Perda sesuai Mutu dan pelayanan ganti rugi			100%
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	<i>*jumlah total yang harus dilayani</i>	<i>*jumlah total yang Terlayani</i>	<i>*yang belum Terlayani</i>	0.00%
		30	30	0	
		Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	Persentase capaian mutu 0.00%
		1	2	3	4
	1 . warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian pelayanan pengobatan	0	0	0	0.00%
	2 . warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil	0	0	0	0.00%
2.	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Terhadap Jumlah Penegakan Perda sesuai Mutu	Jumlah Penegakan Perda sesuai Mutu			100,00%
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	<i>*jumlah total yang harus dilayani</i>	<i>*jumlah total yang Terlayani</i>	<i>*yang belum Terlayani</i>	100,00%
		30	30	0	
		Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	Persentase capaian mutu 100%
		1	2	3	4
	1 . Pemenuhan standar sarana prasarana Satpol PP yang digunakan sebagai penunjang proses penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penegakan Perda dan Perkada yang dilaksanakan oleh Satpol PP (jumlah dan kualitas barang dan jasa : gedung kantor, kendaraan operasional dan perlengkapan operasional pada tahun berjalan)	11	11	0	100,00%
	2 . Pemenuhan Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP dalam rangka penegakan perda/perkada serta penyelenggaraan Tibumtranmas sesuai Permendagri 16 Tahun 2023 (SOP penegakan Perda/Perkada, deteksi dini/cegah dini, pembinaan/penyuluhan, pengamanan, pengawalan, patroli, penertiban, dan penanganan unjuk rasa kerusuhan massa)	10	10	0	100,00%
	3 . Pemenuhan standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat dalam rangka penegakan perda/perkada serta penyelenggaraan Tibumtranmas atau ASN yang	331	331	0	100,00%



	telah lulus diklat dasar Satpol PP** dan satlinmas yang telah mengikuti peningkatan kapasitas SDM*** (Jumlah dan kualitas personil/SDM Satuan Polisi Pamong Praja, Penyidik Pegawai Negeri Sipil/PPNS, Satuan Perlindungan Masyarakat/Satlinmas)				
	4. Pemenuhan standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum pelanggaran Perda/Perkada terhadap pelayanan kerugian material	15	15	0	100,00%
	5. Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil (kerusakan akibat penegakan pelanggaran Perda dan Perkada, rusak ringan, rusak sedang, rusak berat)	15	0	15	0,00%
	6. Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan (pertolongan pertama yang terkena cedera fisik ringan akibat penegakan Perda dan Perkada dan ditindaklanjuti dengan membawa ke rumah sakit/pusat kesehatan masyarakat bila terkena cedera fisik sedang dan/atau berat)	0	0	0	100,00%
3 .	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana				100.00%
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	<i>*jumlah total yang harus dilayani</i>	<i>*jumlah total yang Terlayani</i>	<i>*yang belum Terlayani</i>	<i>*jumlah total yang harus dilayani</i>
		0	0	0	0.00%
		Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	Persentase capaian mutu 100%
		1	2	3	4
		0	0	0	0.00%
4 .	Pelayanan Informasi Rawan Bencana				0,00%
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	<i>*jumlah total yang harus dilayani</i>	<i>*jumlah total yang Terlayani</i>	<i>*yang belum Terlayani</i>	0.00%
		0	0	0	
		Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	Persentase capaian mutu 100%
		1	2	3	4
	1 . Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana			0	0 0,00%
	2 . Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana			0	0 0,00%
	3 . Identifikasi warga yang berpotensi menjadi korban bencana	0	0	0	0,00%
	4 . Melakukan sosialisasi, Komunikasi, informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana	0	0	0	0,00%
	5 . Pengadaan dan pemasangan	0	0	0	0,00%



rambu evakuasi dan papan informasi publik per jenis bencana					
5.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana				0,00%
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	<i>*jumlah total yang harus dilayani</i>	<i>*jumlah total yang Terlayani</i>	<i>*yang belum Terlayani</i>	0.00%
		0	0	0	
		Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	Persentase capaian mutu 100%
		1	2	3	4
	1 . Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	0	0	0	0.00%
	2 . Pendataan terhadap warga yang terkena/menjadi korban bencana	0	0	0	0.00%
	3 . Melakukan respon cepat KLB dan respon cepat darurat bencana	0	0	0	0.00%
	4 . Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana		0	0	0.00%
	5 . Respon Cepat kejadian luar biasa (KLB) penyakit KLB/wabah zoonosis prioritas		0	0	0.00%
	6 . Pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana		0	0	0.00%
11	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran				100,00%
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	<i>*jumlah total yang harus dilayani</i>	<i>*jumlah total yang Terlayani</i>	<i>*yang belum Terlayani</i>	100,00%
		10	10	0	
		Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	Persentase capaian mutu 100%
		1	2	3	4

1 . Pemenuhan tingkat waktu tanggap (response time)15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi	10	10	0	100,00%
2 . Pemenuhan Standar Operasional Prosedur penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi	11	11	0	0,00%
3. Pemenuhan sarana prasarana pemadam kebakaran	10	10	0	100,00%
4. Pemenuhan standar peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/Sumber Daya Manusia	45	45	0	100,00%
5. Pemenuhan pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran	0	0	0	100,00%
6. Pemenuhan pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran	0	0	0	100,00%

6. SPM Sosial

Mutu Pelayanan Dasar SPM Sosial ditetapkan dalam standar teknis, yang sekurang-kurangnya memuat standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa, standar jumlah dan kualitas sumber daya manusia kesejahteraan sosial dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar. Jenis Pelayanan Dasar pada SPM sosial Daerah provinsi terdiri atas:

1. rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam panti
2. rehabilitasi sosial dasar anak telantar di dalam panti
3. rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di dalam panti
4. rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti
5. perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi.

Sedangkan Jenis Pelayanan Dasar pada SPM sosial daerah kabupaten/kota terdiri atas:

- a. rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti
- b. rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti;
- c. rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di luar panti
- d. rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti
- e. perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota.

Penerima Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan pada SPM Sosial yaitu Warga Negara dengan ketentuan:

- a. Penyandang disabilitas telantar untuk Jenis Pelayanan Dasar rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam dan di luar panti



- b. Anak telantar untuk Jenis Pelayanan Dasar rehabilitasi sosial dasar anak telantar di dalam dan di luar panti
- c. Lanjut usia terlantar untuk Jenis Pelayanan Dasar rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di dalam dan di luar panti
- d. Gelandangan dan pengemis untuk Jenis Pelayanan Dasar rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam dan di luar panti
- e. Korban bencana provinsi untuk Jenis Pelayanan Dasar perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi
- f. Korban bencana kabupaten/kota untuk Jenis Pelayanan Dasar perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota.

Ketentuan lebih lanjut mengenai standar teknis dalam upaya pemenuhan SPM Sosial adalah dengan mengacu pada Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah Provinsi Dan Di Daerah Kabupaten/Kota. Adapun capaian SPM Urusan Perumahan Rakyat Tahun 2025 yaitu :



**Table 6.1
CAPAIAN SPM URUSAN SOSIAL
KABUPATEN DOMPU TAHUN 2025**

Tabel. 1 CAPAIAN SPM URUSAN SOSIAL KABUPATEN DOMPU TAHUN 2025						
NO	INDIKATOR KINERJA/JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)
KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM			Tuntas Utama			92,00
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas					100,00
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80,00
	A JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :		495	495	0	100,00
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20,00
	B Jumlah Mutu Barang /Jasa/SDM		Jumlah Mutu Barang /Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang /Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang /Jasa Yang Belum Tersedia	100,00
	1 Layanan data dan pengaduan	Orang	5	5	0	100
	2 Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat	Orang	8	8	0	100
	3 Penyediaan permakanan	Orang	413	413	0	100
	4 Penyediaan sandang	Orang	82	82	0	100
	5 Penyediaan alat bantu	Orang	8	8	0	100
	6 Penyediaan perbekalan kesehatan	Orang	5	5	0	100
	7 Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial untuk meningkatkan keberfungsian sosial	Orang	25	25	0	100
	8 Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar	Orang	25	25	0	100
	9 Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	Orang	20	20	0	100
	10 Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	25	25	0	100
	11 Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga	Orang	5	5	0	100
	12 Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	5	5	0	100
	13 Layanan rujukan	Orang	8	8	0	100



**RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (RLPPD)
TAHUN 2025 KABUPATEN DOMPU**



2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di Luar Pantl						100,00	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				Jumlah Total Yang Harus	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80,00
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :				358	358	0	100,00
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)							20,00
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM				Jumlah Mutu	Jumlah Mutu Barang	Jumlah Mutu Barang	100,00
	1	Layanan data dan pengaduan	Orang	5	5	0	100	
	2	Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat	Orang	8	8	0	100	
	3	Penyediaan permakanan	Orang	210	210	0	100	
	4	Penyediaan sandang	Orang	27	27	0	100	
	5	Penyediaan alat bantu	Orang	5	5	0	100	
	6	Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)	Orang	10	10	0	100	
	7	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual	Orang	25	25	0	100	
	8	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas Anak Terlantar	Orang	25	25	0	100	
	9	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan	Orang	10	10	0	100	
	10	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar/ fasilitasi layanan pendidikan dan kesehatan	Orang	10	10	0	100	
	11	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	Orang	10	10	0	100	
	12	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	4	4	0	100	
	13	Layanan rujukan		8	8	0	100	



3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Pantl					100,00	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80,00	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :		237	237	0	100,00	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20,00	
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Barang /Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang /Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang /Jasa Yang Belum Tersedia	100,00	
	1	Layanan data dan pengaduan	Orang	5	5	0	100
	2	Penyediaan layanan kedaruratan /layanan reaksi cepat	Orang	8	8	0	100
	3	Penyediaan permakanan	Orang	210	210	0	100
	4	Penyediaan sandang	Orang	27	27	0	100
	5	Penyediaan alat bantu	Orang	5	5	0	100
	6	Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)	Orang	10	10	0	100
	7	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual	Orang	25	25	0	100
	8	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas Anak Terlantar	Orang	25	25	0	100
	9	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak/ Bukti dokumen kependudukan	Orang	10	10	0	100
	10	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar/fasilitasi layanan pendidikan dan kesehatan	Orang	10	10	0	100
	11	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	Orang	10	10	0	100
	12	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	4	4	0	100
	13	Layanan rujukan	Orang	8	8	0	100
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Pantl					60,00	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	40,00	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :		32	16	16	50,00	



RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (RLPPD)
TAHUN 2025 KABUPATEN DOMPU



PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)							20,00
B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM				Jumlah Mutu Barang /Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang /Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang /Jasa Yang Belum Tersedia	100,00
1		Layanan data dan pengaduan	Orang	2	2	0	100
2		Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat	Orang	2	2	0	100
3		Penyediaan permakanaan	Orang	8	8	0	100
4		Penyediaan sandang	Orang	8	8	0	100
5		Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)	Orang	5	5	0	100
6		Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual	Orang	8	8	0	100
7		Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga gelandangan dan pengemis	Orang	2	2	0	100
8		Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan	Orang	3	3	0	100
9		Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar/ fasilitasi layanan pendidikan dan kesehatan	Orang	8	8	0	100
10		Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	Orang	8	8	0	100
11		Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	8	8	0	100
12		Layanan rujukan	Orang	8	8	0	100



5	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota					100
PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80
A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :			199	199	0	100
PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)						20
B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM			Jumlah Mutu Barang /Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang /Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang /Jasa Yang Belum Tersedia	100
1	Penyediaan permakanaan		Orang	199	199	0
2	Penyediaan sandang		Orang	199	199	0
3	Penyediaan tempat penampungan pengungsi		Unit	3	3	0
4	Penanganan khusus bagi kelompok rentan		Orang	25	25	0
5	Pelayanan dukungan Psikososial		Orang	25	25	0



3. Hasil Eppd Dan Opini Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Sebelumnya



PEMERINTAH KABUPATEN DOMPU
INSPEKTORAT

Jln. Syech Muhammad Nomor 03 Tlp. (0373) 2723211 Dompu – NTB
Website Inspektorat Kab. Dompu : Inspektorat.dompu.go.id

PERSENTASE TINDAK LANJUT REKOMENDASI BADAN PEMERIKSA
KEUANGAN TAHUN ANGGARAN N-1
KABUPATEN DOMPU
TAHUN 2025

No	Jumlah Rekomendasi Sampai Dengan Tahun Anggaran N-1	Tindak Lanjut Rekomendasi		Capaian (%)	Ket
		Sudah Ditindaklanjuti	Belum Ditindaklanjuti		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3)/(4)	(6)
1.	1.005	825	180	82,09	
2.					
3.					
Dst.					
Jumlah Total		825	180	82,09	

Catatan : Lampirkan Berita Acara Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK.



Dompu, 2 Februari 2026

Inspektur,

IUFRI, ST, M.Si

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 197112041999021001



**RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (RLPPD)
TAHUN 2025 KABUPATEN DOMPU**



Lampiran 3

REKAPITULASI HASIL PEMANTAUAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BPK

AUDITAMA/PERWAKILAN BPK : PERWAKILAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
ENTITAS : KABUPATEN DOMPU

(Nilai dalam Rupiah)

No.	Tahun Pemeriksaan	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut								Nilai Penyerahan Aset atau Penyetoran Uang ke Kas Negara/Daerah/ Perusahaan
						Sesuai dgn Rekomendasi		Belum sesuai dan dalam Proses Tindak Lanjut		Belum ditindaklanjuti		Tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yg sah		
						Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	2025	20	1.795.604.345,39	53	1.356.285.657,66	24	156.117.387,33	27	1.099.864.685,66	2	157.426.000,00	0	0,00	930.039.825,79
2	2024	11	826.334.831,09	15	85.576.320,00	9	36.243.310,00	6	49.333.010,00	0	0,00	0	0,00	1.649.595.066,27
3	2023	16	1.572.502.123,50	38	1.161.621.203,66	21	985.234.123,00	17	176.387.080,66	0	0,00	0	0,00	1.039.955.392,84
4	2022	17	863.899.313,75	37	866.425.333,24	12	449.767.381,40	25	416.657.951,84	0	0,00	0	0,00	449.767.381,40
5	2021	19	2.543.802.217,97	56	2.543.802.217,97	46	2.122.762.845,19	10	421.039.372,78	0	0,00	0	0,00	2.122.762.845,19
6	2020	18	6.074.624.662,67	55	1.714.179.218,67	39	821.826.348,95	16	892.352.869,72	0	0,00	0	0,00	726.644.716,95
7	2019	17	1.505.235.491,51	56	1.461.991.491,51	53	1.125.251.491,51	3	336.740.000,00	0	0,00	0	0,00	1.178.345.491,51
8	2018	18	1.123.234.659,45	53	837.231.537,83	45	270.450.678,16	8	566.780.859,67	0	0,00	0	0,00	556.453.799,78
9	2017	17	2.356.826.958,88	56	2.087.211.985,15	49	1.605.764.552,92	7	481.447.432,23	0	0,00	0	0,00	1.875.612.028,68
10	2016	13	957.895.180,46	31	457.391.553,64	28	316.752.853,64	2	140.638.700,00	1	0,00	0	0,00	817.256.480,46
11	2015	25	1.124.865.466,96	85	239.921.455,32	81	179.261.955,31	4	60.659.500,01	0	0,00	0	0,00	291.261.955,31
12	2014	19	1.243.521.639,52	74	1.165.494.285,52	61	419.064.902,00	11	570.243.051,84	2	176.186.331,68	0	0,00	419.064.902,00
13	2013	18	985.185.833,00	68	878.925.020,00	61	693.346.840,00	7	185.578.180,00	0	0,00	0	0,00	693.346.840,00
14	2012	43	7.265.429.248,15	141	5.243.732.763,15	130	1.234.498.261,60	10	525.140.705,55	1	59.637.000,00	0	3.424.456.796,00	1.225.423.261,60
15	2011	15	190.318.068,00	27	190.318.068,00	25	174.526.518,00	2	15.791.550,00	0	0,00	0	0,00	174.526.518,00
16	2010	15	227.662.251,18	25	227.662.251,18	21	148.051.868,00	4	77.285.983,18	0	0,00	0	2.324.400,00	148.051.868,00
17	2009	19	2.001.033.386,00	46	2.001.033.386,00	41	251.667.276,00	5	339.134.253,00	0	0,00	0	1.410.231.857,00	251.667.276,00
18	2008	20	658.013.454,00	38	658.013.454,00	33	241.291.484,00	3	406.721.970,00	0	0,00	2	10.000.000,00	241.291.484,00
19	2007	20	2.759.171.359,40	35	2.759.171.359,40	33	2.353.011.878,40	2	406.159.481,00	0	0,00	0	0,00	2.353.011.878,40
20	2006	16	703.092.924,54	16	703.092.924,54	11	304.850.152,61	5	398.242.771,93	0	0,00	0	0,00	304.850.152,61
TOTAL		374	36.778.253.415,42	1005	26.639.081.486,44	823	13.889.742.108,02	174	7.566.199.409,07	6	393.249.331,68	2	4.847.013.053,00	17.448.929.164,79



Mataram, 30 Desember 2025
Kepala Perwakilan

Suparwadi, S.E., M.M., Ak, ERMAP, CSFA
NIP 197003081991031003



4. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025

1. Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
PENDAPATAN DAERAH	1.287.343.219.650,00	1.276.094.913.108,13	99,12	1.312.194.446.391,20
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	151.823.024.836,00	143.729.226.365,13	94,66	137.094.517.854,20
• Pajak Daerah	33.453.897.208,00	31.088.649.089,25	92,92	21.933.648.967,21
Pajak Hotel	0	0	0	1.240.066.483,00
Pajak Restoran	0	0	0	3.882.671.573,00
Pajak Hiburan	0	0	0	6.850.000,00
Pajak Reklame	557.300.000,00	674.546.232,61	121,03	522.937.115,11
Pajak Penerangan Jalan	0	0	0	10.521.937.404,00
Pajak Parkir	0	0	0	60.717.200,00
Pajak Air Tanah	904.000.000,00	899.649.528,84	99,51	897.495.211,20
Pajak Sarang Burung Walet	7.500.000,00	6.000.000,00	80,00	8.000.000,00
Pajak Mineral Bukan Logam dan batuan	650.000.000,00	705.840.989,80	108,59	1.352.444.627,90
Pajak Bumi dan bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	1.750.000.000,00	2.775.351.597,00	158,59	332.564.219,00
Pajak Bea pengolahan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	1.850.000.000,00	2.379.065.930,00	128,59	2.107.965.134,00
Pajak Barang dan Jasa tertentu (PBJT)	15.764.720.000,00	13.744.149.828,00	87,37	0
Opsen Pajak Kendaraan bermotor (PKB)	7.976.176.486,00	5.930.311.475,00	74,35	0
Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	3.994.200.722,00	3.943.733.508,00	98,73	0
• Retribusi Daerah	5.264.092.000,00	9.321.581.293,00	177,07	10.375.558.177,00
Retribusi Umum	1.914.570.000,00	5.458.245.516,00	285,08	7.127.886.834,00
Retribusi Jasa Usaha	2.329.522.000,00	2.737.536.677,00	117,51	2.639.724.000,00
Retribusi perijinan tertentu	1.020.000.000,00	1.125.799.100,00	110,37	607.947.341,00
• Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	15.012.520.429,00	15.012.520.429,00	100,00	14.692.095.300,00
Bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Deviden)	15.012.520.429,00	15.012.520.429,00	100,00	14.692.095.300,00
• Lain-lain PAD yang Sah	98.092.515.199,00	88.306.475.553,88	90,02	90.093.215.409,99
Hasil Penjualan BMD yang tidak dipisahkan	614.500.000,00	213.811.400,00	34,79	34.690.000,00



RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (RLPPD)

TAHUN 2025 KABUPATEN DOMPU



Hasil Pemanfaatan BMD yg tidak dipisahkan	50.000.000,00	0	0	45.500.000,00
Jasa Giro	1.891.020477,00	1.588.058.437,33	83,97	1.299.399.897,05
Pendapatan Bunga	2.643.155.605,00	429.132.978,42	16,23	898.318.376,02
Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	2.459.411.321,00	904.674.169,93	36,78	848.165.905,14
Penerimaan Komisi, Potongan, atau bentuk lain	2.906.848.655,00	2.667.129.197,30	91,75	68.151.199,00
Pendapatan Denda atau keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	338.881.146,00	106.693.124,66	31,48	26.502.080,89
Pendapatan Denda Pajak Daerah	117.839.093,00	405.211.682,00	343,86	54.401695,00
Pendapatan Denda Retribusi Daerah	0	1.411.000,00	00	00
Pendapatan dari Pengembalian	607.357.861,00	662.368.513,00	109,05	857.830.926,00
Pendapatan BLUD	86.463.501.041,00	79.563.411.448,24	92,01	68.229.222.226,96
Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	0	1.764.573.603,00	0	17.708.411.290,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan dana Bergulir	0	0	0	0
JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	151.823.024.836,00.	143.729.226.365,13	94,66	137.094.517854,20
PENDAPATAN TRANSFER	1.095.411.968.493,00	1.093.816.264.669,00	99,85	1.083.111.178.076,00
• Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.045.917.251.000,00	1.042.507.592.231,00	99,67	1.019.623.001.369,00
Dana Perimbangan	0	0	0	936.834.420.869,00
Dana -Dana Bagi Hasil (DBH)	103.894.957.000,00	103.457.515.322,00	99,57	0
Dana Transfer Umum- (DAU)	679.848.107.000,00	696.339.270.273,00	102,42	0
Dana -Dana Alokasi Khusus (DAK)	191.681.491.000,00	172.218.110.636,00	89,840	0
JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER DANA PERIMBANGAN	975.424.555.000,00	972.014.896.231,00	99,65	936.834.420.869,00
Dana Desa	70.492.696.000,00	70.492.696.000,00	100,00	72.986.944.000,00
Insentif Fiskal	0	0	0	9.801.636.500,00
JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA	70.492.696.000,00	70.492.696.000,00	100,00	82.788.580.500,00
• Pendapatan Transfer Antar Daerah	49.413.717.493,00	51,308.672.438,00	103,67	63.488.176.707,00
Pendapatan Bagi Hasil	49.413.717.493,00	51,227.672.438,00	103,67	63.488.176.707,00
Bantuan Keuangan	81.000.000,00	81.000.000,00	100,00	0

**RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (RLPPD)****TAHUN 2025 KABUPATEN DOMPU**

JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	49.494.717.493,00	51.308.672.438.,00	103,66	63.488.176.707,00
JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER	1.095.411.968.493,00	1.093.816.264.669,00	99,85	1.083.111.178.076.,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	40.108.226.321,00	38.549.422.074,00	96,11	91.988.750.461,00
• Pendapatan Hibah	0	0	0	17.699.148.000,00
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	0	0	0	17.699.148.000,00
• Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan peraturan perundang-undangan	40.108.226.321,00	38.549.422.074,00	96,11	74.289.602.461,00
Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada FKTP	13.783.705.028,00	12.244.900.781,00	88,69	0
Pendapatan Bagi Hasil Pemegang IUPK atas pertambangan Mineral	26.324.521.293,00	26.324.521.293,00	100	74.289.602.461,00
JUMLAH LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	40.108.226.321,00	38.549.422.074,00	96,11	91.988.750.461,00
JUMLAH PENDAPATAN	1.287.343.219.650,00	1.276.094.913.108,13	99,12	1.312.194.446.391.20

2. Realisasi Belanja Menurut Belanja

BELANJA DAERAH	1.363.920.599.314,00	1.263.545.524.958,23	92,64	1.259.050.961.690,86
BELANJA OPERASI	1.113.274.154.559,00	1.030.399.703.248,60	92,55	999.652.398.738,56
• Belanja Pegawai	682.944.498.393,00	558.991.722.090,42	81,85	522.213.854.144,00
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	473.713.097.726,00	453.442.341.916,00	95,72	389.106.780.636,00
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	193.338.260.159,00	89.774.119.562,42	46,43	55.845.472.149,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Obyektif lainnya	0	12.000.000,00	0	61.640.923.622,00
Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	13.220.215.225,00	13.142.050.564,00	99,40	13.078.913.523,00
Belanja Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah (KDH)/Wakil Kepala Daerah (WKDH)	410.205.283,00	218.631.948,00	53,29	564.946.884,00
Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	610.880.000,00	601.599.600,00	98,48	524.533.330,00
Belanja Pegawai BLUD	1.651.840.000,00	1.800.978.500,00	109,02	1.452.284.000,00
• Belanja Barang dan Jasa	392.821.529.166,00	435.081.804.585,18	110,75	420.876.692.502,56
Belanja Barang	130.777.697.952,00	122.554.221.966,18	93,71	169.454.396.227,15



RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (RLPPD)

TAHUN 2025 KABUPATEN DOMPU



Belanja Jasa	120.113.157.182,00	110.522.143.999,00	92,01	108.081.383.983,81
Belanja Pemeliharaan	14.639.373.477,00	11.182.187.808,00	76,38	9.270.269.616,00
Belanja Perjalanan Dinas	21.622.810.822,00	20.561.266.332,00	95,09	29.496.104.990,00
Belanja Uang dan/atau Jasa untuk diberikan pada Pihak ketiga/Pihak lainnya/Masyarakat	3.787.066.400,00	3.604.339.924,00	95,17	2.178.418.968,00
Belanja Barang dan Jasa Bos	0	0	0	31.999.332.984,44
Belanja Barang dan Jasa BOSP	21.490.189.899,00	30.059.804.595,00	139,87	0
Belanja Barang dan Jasa BLUD	80.391.233.434,00	136.597.839.961,00	169,91	70.396.785.733,16
• Belanja Hibah	29.546.627.000,00	28.364.676.573,00	95,99	52.829.352.092,00
Belanja Hibah Kepada Pemerintah Pusat	2.100.000.000,00	2.099.239.999,00	99,96	20.239.817.692,00
Belanja Hibah Kepada Badan/Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan	14.508.337.000,00	13.365.480.000,00	92,12	15.079.350.000,00
Belanja Hibah Dana Bos	0	0	0	2.141.551.200,00
Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada partai Politik	770.890.000,00	770.770.000,00	99,98	685.307.500
Belanja Hibah Dana BOSP	12.167.400.000,00	12.129.186.574,00	99,68	14.683.325.700,00
• Belanja Bantuan Sosial	7.961.500.000,00	7.961.500.000,00	100	3.732.500.000,00
Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	170.000.000,00	170.000.000,00	100	1.500.000.000,00
Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	7.791.500.000,00	7.791.500,00	100	2.232.500.000,00
JUMLAH BELANJA OPERASI	1113.274.154.559,00	1.030.399.703.248,60	92,55	999.652.398.738,56
BELANJA MODAL	95.554.738.044,00	80.654.326.400,00	84,84	116.860.279.412,30
• Belanja Modal Tanah	1.600.000.000,00	1.600.000.000,00	100	60.000.000,00
Belanja Modal Tanah	1.600.000.000,00	1.600.000.000,00	100	60.000.000,00
• Belanja Modal Peralatan dan Mesin	27.534.331.376,00	18.328.318.369,00	66,56	24.274.574.912,00
Belanja Modal Alat Besar	121.759.000,00	109.095.200,00	89,59	78.768.000,00
Belanja Modal Alat Angkut	4.513.250.000,00	4.459.362.055,00	98,80	7.447.500.000,00
Belanja Modal Alat Bengkel dan alat Ukur	73.300.000,00	73.300.000,00	100	15.875.000,00
Belanja Modal Alat Pertanian	5.000.000,00	5.000.000,00	100	3.300.000,00
Belanja Modal Alat Kantor dan Alat Rumah Tangga	4.870.882.000,00	4.749.643.555,00	97,51	3.166.988.713,00
Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	1.885.813.000,00	1.839.967.057,00	97,56	1.345.592.024,00
Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	586.367.376,00	156.905.755,00	26,75	5.369.746.190,00
Belanja Modal Alat Laboratorium	298.071.000,00	178.350.000,00	59,83	614.900.000,00
Belanja Modal Komputer	3.856.553.000,00	3.790.876.747,00	98,29	3.089.499.913,00
Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	8.000.000,00	8.000.000,00	100	0
Belanja Modal Peralatan Olahraga	3.300.000,00	3.300.000,00	100	34.100.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bos	0	0	0,00	2.140.341.100,00



RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (RLPPD)

TAHUN 2025 KABUPATEN DOMPU



Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP	6.609.036.000,00	2.615.388.000,00	39,57	0
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	4.703.000.000,00	339.130.000,00	7,21	967.963.972,00
• Belanja Modal Gedung dan Bangunan	30.139.937.511,00	26.758.942.226,00	88,78	40.092.279.901,30
Belanja Modal Bangunan Gedung	26.128.337.511,00	22.945.281.624,00	87,59	35.955.896.768,30
Belanja Modal Bangunan Monumen	115.000.000,00	115.000.000,00	100	219.500.000,00
Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	3.616.600.000,00	3.604.692.102,00	99,67	3.377.072.609,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	280.000.000,00	93.968.500,00	33,56	539.810.524,00
• Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	30.613.299.157,00	29.907.113.005,00	97,69	50.778.719.049,00
Belanja Modal Jalan dan Jembatan	22.783.631.900,00	22.737.763.460,00	99,79	33.947.502.000,00
Belanja Modal Bangunan Air	6.229.667.257,00	6.021.045.657,00	96,65	15.826.787.576,00
Belanja Modal Instalasi	1.200.000.000,00	948.353.888,00	79,02	905.400.000,00
Belanja Modal Jaringan	200.000.000,00	199.950.000,00	99,97	99.029.473,00
Belanja Modal Jalan Jaringan, dan Irigasi BLUD	200.000.000,00	0	0	0
• Belanja Modal Aset tetap Lainnya	5.283.028.000,00	3.701.358.300,00	70,06	1.347.401.700,00
Belanja Modal Bahan Perpustakaan	276.251.000,00	56.000.000,00	20,27	72.992.000,00
Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	50.000.000,00	50.000.000,00	100	49.950.000,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	0	0	0	1.224.459.700,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP	4.956.777.000,00	3.595.358.300,00	72,53	0
• Belanja Modal Aset Lainnya	384.142.000,00	358.594.500,00	93,34	307.303.850,00
Belanja Modal Aset lainnya –aset tidak berwujud	384.142.000,00	358.594.500,00	93,34	307.303.850,00
JUMLAH BELANJA MODAL	95.554.738.044,00	80.654.326.400,00	84,40	116.860.279.412,30
BELANJA TIDAK TERDUGA	3.498.358.995,00	1.170.247.794,63	33,45	385.444.720,00
• Belanja Tidak Terduga	3.498.358.995,00	1.170.247.794,63	33,45	385.444.720,00
Belanja Tidak Terduga	3.498.358.995,00	1.170.247.794,63	33,45	385.444.720,00
JUMLAH BELANJA TIDAK TERDUGA	3.498.358.995,00	1.170.247.794,63	33,45	385.444.720,00
BELANJA TRANSFER	151.593.347.716,00	151.321.247.515,00	99,82	142.152.838.820,00
• Belanja Bagi Hasil	4.525.554.616,00	4.253.454.415,00	93,98	2.585.535.820,00
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota	4.525.554.616,00	4.253.454.415,00	93,98	2.585.535.820,00
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah	0	0	0	536.000.000,00
• Belanja Bantuan Keuangan	147.067.793.100	147.067.793.100,00	100	139.567.303.000,00
Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota	147.067.793.100	147.067.793.100,00	100	139.567.303.000,00
JUMLAH BELANJA TRANSFER	151.593.347.716,00	151.321.247.515,00	99,82	142.152.838.820,00



RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (RLPPD)
TAHUN 2025 KABUPATEN DOMPU



JUMLAH BELANJA	1.363.920.599.314,00	1.263.545.524.958,23	98,64	1.259.050.961.690,86

3. Realisasi Pembiayaan Menurut Pembiayaan

PEMBIAYAAN DAERAH	76.577.379,664,00	76.577.379.664,00	100	23.730.180.053,45
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	76.577.379,664,00	76.577.379.664,00	100	23.730.180.053,45
• Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	76.577.379,664,00	76.577.379.664,00	100	23.730.180.053,45
Sisa Dana Akibat Tidak tercapainya Capaian Target Kinerja dan dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	76.577.379,664,00	76.577.379.664,00	100	23.730.180.053,45
• Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0	0	0	0
Penerimaan Kembali Pinjaman pada Masyarakat	0	0	0	0
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	76.577.379,664,00	76.577.379.664,00	100	23.730.180.053,45
PEMBIAYAAN NETTO	76.577.379,664,00	76.577.379.664,00	100	23.730.180.053,45
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0	89.126.767.813,90	0	76.873.664.753,79



5. Program Inovasi Daerah

Berdasarkan Database Inovasi Daerah pada Pemerintah Kabupaten Dompu memiliki beberapa inovasi Daerah yaitu, sebagai berikut :

NO	PELAKSANA INOVASI	JUDUL INOVASI	BENTUK INOVASI	JENIS
1	Keuangan	PBB ONLINE	Inovasi pelayanan publik	Teknologi
2	administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	RINDUKU BERKOBAR	Inovasi pelayanan publik	Non Digital
3	kesehatan,komunikasi dan informatika	PRO-ADIMAS (PROGRAM AKTIVASI DIGITALISASI PUSKESMAS)	Inovasi pelayanan publik	Teknologi
4	kesehatan,sosial,lingkungan hidup,pemberdayaan masyarakat dan Desa,komunikasi dan informatika	SERULING DIMAS (SERUAN KELILING DI MASJID DAN MUSHALA)	Inovasi pelayanan publik	Non Digital
5	kesehatan,pemberdayaan masyarakat dan Desa	KELOMPOK SWABANTU ODGJ	Inovasi pelayanan publik	Non Digital
6	pendidikan,kesehatan,ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat,sosial	KUDA POST TB (Kumpulkan Dahak Periksa Obati Sampai Tuntas Tuberculosis)	Inovasi pelayanan publik	Non Digital
7	kesehatan,pemberdayaan masyarakat dan Desa	KU BERI HATI (KOMUNITAS BERESIKO HIPERTENSI DAN DIABETES MELITUS)	Inovasi pelayanan publik	Non Digital
8	kesehatan	Pengelolaan satu pintu obat, BMHP (Bahan Medis Habis Pakai) dan Vaksin	Inovasi pelayanan publik	Non Digital
9	kesehatan,sosial	KELOMPOK PENDUKUNG ASI EKSLUSIF (LOVE ASI)	Inovasi pelayanan publik	Non Digital
10	kesehatan,sosial,pemberdayaan masyarakat dan Desa	LIDI LANTI (LINDUNGI DIRI LANSIA RESIKO TINGGI)	Inovasi pelayanan publik	Non Digital
11	kesehatan	PENGGUNAAN APLIKASI DORY (DRUG INVENTORY) DALAM RANGKA OPTIMALISASI PENGELOLAAN PERSEDIAAN OBAT	Inovasi tata kelola pemerintahan daerah	Teknologi



RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (RLPPD)
TAHUN 2025 KABUPATEN DOMPU



12	pertanian	PEMUPUKAN TAMBAK MENGGUNAKAN PUPUK HAYATI PONDA WILA (BUAH MAJA)	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	Non Digital
13	kesehatan,pemberdayaan masyarakat dan Desa	NGOBRAS SEVACO 19 (NGOBROL ASIK SEPUTAR VAKSIN COVID 19)	Inovasi pelayanan publik	Non Digital
14	pendidikan,kesehatan,ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat,sosial	Tim Pencet Malaria (penanganan cepat malaria)	Inovasi pelayanan publik	Non Digital
15	kesehatan,pemberdayaan masyarakat dan Desa	TERSAZI KOK (STIKER STATUS GIZI DAN KONSELING ONLINE KELUARGA)	Inovasi pelayanan publik	Non Digital
16	pendidikan,kesehatan,sosial	KIDAL (KEJAR IMUNISASI DASAR LENGKAP)	Inovasi pelayanan publik	Non Digital
17	pertanian	PUSAT KESEHATAN HEWAN (PUSKESWAN) KELILING	Inovasi pelayanan publik	Non Digital
18	pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	YAKIN BISA	Inovasi pelayanan publik	Non Digital
19	pendidikan	Rancang Bangun RUNNING TEXT Led Display	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	Teknologi
20	pendidikan,kesehatan,sosial	JERIT STUNTING (JARING EDUKASI INTERVENSI STUNTING)	Inovasi pelayanan publik	Non Digital
21	pendidikan,kebudayaan,perpustakaan	DONGBORALING (DONGENG TAMBORA KELILING)	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	Non Digital
22	pertanian	PENGGUNAAN BAHAN BAKAR GAS (BBG) LIQUIFIED PETROLIUM GAS (LPG) SEBAGAI PENGGANTI BAHAN BAKAR MINYAK PADA MESIN POMPA AIR	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	Non Digital
23	pertanian	POMPA HIDRAM	Inovasi Daerah lainnya sesuai	Non Digital



RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (RLPPD)
TAHUN 2025 KABUPATEN DOMPU



			dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	
24	pertanian	Manfaat ganda Cultivator sebagai mesin pompa air berbahan bakar LPG	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	Non Digital
25	perpustakaan,kearsipan,Keuangan	"GO LPJ" (Buku Arsip LPJ Berbasis QR Code)	Inovasi tata kelola pemerintahan daerah	Teknologi
26	Fungsi Penunjang lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	IMPLEMENTASI PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT AUDITOR MELALUI APLIKASI SIBIJAK (SISTEM INFORMASI BINA JABATAN AUDITOR BERKUALITAS)	Inovasi tata kelola pemerintahan daerah	Teknologi
27	Fungsi Penunjang lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	OPTIMALISASI PELAYANAN WHISTLEBLOWING SYTEM (SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN) BERBASIS WEBSITE PADA INSPEKTORAT KABUPATEN DOMPU	Inovasi tata kelola pemerintahan daerah	Digital
28	Fungsi Penunjang lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	DATABASE TEMUAN DAN REKOMENDASI HASIL AUDIT MENGGUNAKAN GOOGLE SPREADSHEET	Inovasi tata kelola pemerintahan daerah	Teknologi
29	pendidikan	Banana Fronds Camilan Sehat	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	Non Digital
30	pendidikan	MENABUNG AIR DI HALAMAN SEKOLAH	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	Non Digital
31	kesehatan	PENINGKATAN PENGETAHUAN SISWA SEKOLAH DASAR TENTANG PENCEGAHAN KARIES MELALUI GURITA PAGI (PANGGUNG CERITA PAHLAWAN GIGI) DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS DOMPU TIMUR	Inovasi pelayanan publik	Non Digital



**RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (RLPPD)
TAHUN 2025 KABUPATEN DOMPU**



32	kesehatan	OPTIMALISASI PELAYANAN KONSELING OBAT YANG INFORMATIF DAN RASIONAL MELALUI TEMU SOBAT “TEMAN KOMUNIKATIF KONSUMSI OBAT” DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS DOMPU TIMUR	Inovasi pelayanan publik	Non Digital
33	kesehatan, pemberdayaan masyarakat dan Desa	KOIN DESA (GERAKAN KONSELING ONLINE DENGAN WHATSAPP GROUP) UNTUK MENINGKATKAN PENGETAHUAN STUNTING BAGI IBU HAMIL DI WILAYAH KERJA UPTD PUSKESMAS DOMPU BARAT	Inovasi pelayanan publik	Digital
34	kesehatan	MENINGKATKAN KESADARAN PASIEN DALAM MENERAPKAN CUCI TANGAN PAKAI SABUN (CTPS) MELALUI DECITA (DEMO CUCI TANGAN) DI UPTD PUSKESMAS DOMPU BARAT	Inovasi pelayanan publik	Non Digital
35	pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	DP3A MENYAPA	Inovasi pelayanan publik	Non Digital
36	Keuangan	SIPAS -SISTEM INFORMASI PENUNJANG SIPD-DALAM PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN DOMPU	Inovasi tata kelola pemerintahan daerah	Digital
37	administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	LACAK MANTAN	Inovasi pelayanan publik	Non Digital
38	administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	JEBOL LAGI	Inovasi pelayanan publik	Non Digital
39	Fungsi Penunjang lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	OPTIMALISASI PENATAAN ARSIP LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN (LHP) SECARA DIGITAL MENGGUNAKAN GOOGLE DRIVE PADA INSPEKTORAT KABUPATEN DOMPU	Inovasi tata kelola pemerintahan daerah	Teknologi
40	administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	OI MARAI	Inovasi pelayanan publik	Teknologi
41	administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	GOES TO SCHOOL	Inovasi pelayanan publik	Non Digital
42	administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	RELA DICEK MALAM	Inovasi pelayanan publik	Non Digital



**RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (RLPPD)
TAHUN 2025 KABUPATEN DOMPU**



43	administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	GO TO LAKEI	Inovasi pelayanan publik	Non Digital
44	administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	KASAMA RAI	Inovasi pelayanan publik	Non Digital
45	administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	ADA DATA	Inovasi pelayanan publik	Teknologi
46	pertanian	Media Jaringan Obrolan Petani (Jompa) Distanbun Dompu	Inovasi pelayanan publik	Digital
47	kesehatan	MASIH ASLI (Optimalisasi Distribusi Hasil Laboratorium)	Inovasi pelayanan publik	Non Digital
48	sosial	ANTRAKSI UTAMA	Inovasi pelayanan publik	Teknologi
49	koperasi, usaha kecil, dan menengah	AMANDA MANOPO	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	Teknologi